

## **BAB 5**

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis tentang analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan opini audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena rata-rata PAD yang diperoleh tiap kabupaten di Jawa Timur masih rendah yaitu sebesar 9,4% dari total pendapatan daerah. Dengan terlihatnya PAD tiap daerah menunjukkan pendapatan daerah lainnya diperoleh dari pendapatan yang tidak berasal dari kekayaan daerah melainkan sebagian besar berasal dari transfer pemerintah pusat dan pendapatan lain-lain.
2. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dilihat dari DAU memiliki keterkaitan terhadap skor kinerja pemerintah daerah karena besarnya penerimaan

DAU oleh suatu daerah, maka kinerja pemerintah daerah tidak optimal. Hal ini karena pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat dan merasa dapat mengandalkan DAU.

3. Belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Dikatakan tidak berpengaruh signifikan karena sering terjadinya belanja modal yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan banyak terjadi kasus *mark up* terhadap belanja modal yang mengakibatkan kerugian dan juga penyelewengan dana, sehingga disimpulkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.
4. Opini audit BPK berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur. Semakin baik opini audit BPK maka semakin memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja lebih baik.

## **5.2 Keterbatasan**

1. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel karakteristik pemerintah daerah yang digambarkan melalui tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja modal dan opini audit

BPK. Variabel ini hanya menjelaskan sebagian dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel opini audit BPK. Dalam opini tersebut tidak dijelaskan secara detail seberapa besar temuan audit suatu daerah. Opini audit hanya mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat.

### **5.3 Saran**

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel yang pengukurannya lebih akurat.
2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas variabel penelitian dan bukan hanya faktor keuangan melainkan non keuangan juga bisa menjadi salah satu alternatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, 2016 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit (BPK) Dan Leverage Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau).
- Aziz, 2016 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur).
- Bastian, Indra. 2006. **Akuntansi Sektor Publik di Indonesia**, Edisi Pertama, Penerbit BPFUEGM, dan Pusat Pengembangan Akuntansi. UGM.
- Ghozali, Imam. 2012, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Badan Penerbit Universitas Diponegoro-Semarang.
- \_\_\_\_\_, Imam. 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, Edisi Kedelapan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harumiati dan Payamta, 2014 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun Anggaran 2011.
- Marfiana, N. dan Kurniasih, 2013 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Hasil Pemeriksaan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Musdiantini dan Erawati, 2016 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan dan Opini audit BPK Pada Kinerja Keuangan.

Mustikarini, W. A. dan Fitriasari, D. 2012. Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Nugroho, Renas Adi. 2014. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Pada Periode 2009-2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara pelaksanaan Evaluasi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan.

Pratiwi dan Aryani, 2016 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Kepala Daerah, Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Opini.

Sudarsana dan Rahardjo, 2013 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. (Studi pada Pemerintah kabupaten/Kota di Indonesia).

Sedyaningsih dan Zaky, 2014 Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Teehadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2012)

Tanjung. 2013 Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI, Edisi pertama, Penerbit ALFABETA, cv.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.